



Ahok Pilih Pergub Untuk APBD

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan akan menggunakan peraturan gubernur (pergub) alih-alih peraturan daerah (perda) ketika Kementerian Dalam Negeri menyetujui RAPBD 2015 yang ia kirimkan.

RAPBD itu kini masih dievaluasi Kemendagri hingga 13 Maret nanti. Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo telah menegaskan RAPBD versi Pemprov tersebut tak ada masalah.

"Kalau sampai disahkan, berarti disahkan versi kami. Kami pakai pergub, bukan perda. Lebih enak, kan? Kalau ribut APBD, sampai 2017 pergub melulu. Kita bisa belanja lebih benar, saya bisa bangun rusun lebih banyak," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.

RAPBD DKI 2015 memicu konflik antara Ahok dan DPRD setelah Ahok mengungkapkan ada dana siluman Rp12,1 triliun pada RAPBD hasil Rapat

Pariurna DPRD sehingga ia mengirimkan draf versi Pemprov ke Kemendagri. DPRD menjawab tudingan itu dengan mengajukan hak angket.

Upaya Kemendagri memediasi kedua pihak, kemarin, pun menemui jalan buntu bahkan berakhir dengan keributan. Kian benderang pula dugaan penyusupan dana siluman setelah Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi membeberkan adanya penambahan anggaran yang diusulkan pihaknya sebesar Rp131,9 miliar menjadi Rp270,8 miliar (lihat grafis).

Kemendagri memberikan waktu tujuh hari kepada Gubernur dan DPRD DKI untuk membahas dan menyepakati RAPBD 2015 menjadi Perda APBD setelah dievaluasi. "Kami dorong untuk dibahas bersama

antara Gubernur dan DPRD atas catatan dari Kemendagri yang wajib disesuaikan dan disempurnakan," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnizar Moenok.

Namun, Ahok pesimistis kesepakatan bisa dicapai. "Kita punya waktu tujuh hari, tetapi saya tidak yakin bisa ketemu karena tadi (dalam mediasi) SKPD (satuan kerja perangkat daerah) sudah mengaku tidak usulkan (dana siluman)."

Moenok menjelaskan, jika tak ada titik temu, gubernur dalam keadaan mendesak dapat mengambil keputusan mengenai anggaran dan akan dibahas bersama Kemendagri. Opsi terakhir ialah menggunakan APBD 2014. (Put/Ind/Ssr/X-9)

Dampak Perseteruan Gubernur dan DPRD

- RAPBD bisa tidak disepakati menjadi perda APBD
- Hak keuangan DPRD dan kepala daerah tidak dibayarkan selama 6 bulan

- Solusi :**
- Kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar APBD sebelumnya.

Anggaran Siluman Menurut Wali Kota Jakarta Barat

Rp
Rp
Rp

1. Pengadaan UPS 56 kelurahan @Rp4,22 miliar = Rp236,32 miliar
2. Pengadaan UPS 8 kecamatan @Rp4,22 miliar = Rp33,76 miliar
3. Penanggulangan kenakalan remaja dan pemuda = Rp150 juta
4. Penguatan mental dan spiritual bagi remaja melalui ESQ = Rp150 juta
5. Sosialisasi bahaya minuman keras dan narkoba di kalangan remaja dan pemuda = Rp150 juta
6. Workshop dan pengembangan character building untuk meningkatkan mental dan spiritual remaja dan pemuda = Rp150 juta
7. Peningkatan wawasan spiritual bagi remaja dan pemuda = Rp150 juta

Jumlah total Rp270,83 miliar

Sumber: Pasal 312, 313 UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah/Surat pernyataan Wali Kota Jakarta Barat 2 Maret 2015/L